

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sendiri adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris "*public policy*". *Public policy* selain diterjemahkan menjadi kebijakan publik ada juga yang diterjemahkannya menjadi kebijakan negara atau kebijakan pemerintah (Islamy, 2015:2). Carl I. Friedrich (dalam Dwijowjoto, 2003:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan tertentu".

Menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2008:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya, dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintahan saja. Adapun definisi kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Wahab, 2015:2) adalah "kebijakan diartikan sebagai pedoman

bertindak, pedoman bisa jadi sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus. luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, public atau privat, atau dengan kata lain kebijakan berupa deklaratif, mengenai suatu dasar pandangan bertindak suatu arah tindakan tertentu atau program mengenai aktivitas tertentu suatu rencana"

Menurut Thomas R. Dye, James E. Anderson dan David Easton (dalam Subarsono 2011:8) pengertian kebijakan publik adalah sebagai berikut: "Kebijakan Publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan pemerintah. kebijakan public baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan Publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat".

Sedangkan Menurut Frederick (dalam Tachjan, 2006:8) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangkai mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Mengacu pada pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dan mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan

orang-orang sebagai perencana dan pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri.

Islamy (2015:117-119), berpendapat bahwa tidak tercapainya suatu tujuan kebijakan karena:

- a. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya
- b. Kesalahan dalam mengadministrasikan kebijakan
- c. Dalam merumuskannya hanya berdasarkan satu faktor
- d. Masyarakat merespon/melaksanakan kebijakan sesuai dengan caranya mereka masing-masing
- e. Terjadi kebijakan yang mempunyai tujuan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain
- f. Usaha untuk memecahkan masalah dengan biaya yang lebih besar dari masalahnya sendiri
- g. Terjadinya perubahan sifat kebijakan ketika suatu kebijakan dirumuskan
- h. Adanya masalah baru yang menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah yang ada.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2009:131) implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Nawawi, 2009:131) Implementasi kebijakan adalah "pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas yaitu merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak tujuan yang diinginkan. Menurut Eugene Bardach (dalam Agustino, 2020:153), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: "Cakupan untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para peminat dan para pemilih yang mendengarnya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang merumuskan semua orang".

Hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan atau pelaksanaan pengendalian arah yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Pada umumnya, implementasi kebijakan merupakan kegiatan membentuk suatu hubungan yang dimungkinkan mencapai tujuan program atau

kebijakan, direalisasikan sebagai hasil aktivitas pemerintah. Jika sasaran dan tujuan utama serta dana untuk mencapai sasaran tersebut sudah tersedia, maka implementasi dapat dimulai. Suatu kebijakan yang diimplementasikan oleh implementor kebijakan tersebut diharapkan oleh pemerintah atau kelompok sasaran dapat berjalan dengan baik. Sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program, dapat dilihat dari pendapat Ripley & Franklin (dalam Subarsono 2011:7) yang mengatakan bahwa:

"Keberhasilan implementasi memiliki arti bagi pihak yang berbeda-beda. Salah satu ukurannya adalah seberapa baik tujuan itu tercapai, baik mengenai prosedur maupun dampak. Ini merupakan suatu definisi keberhasilan yang valid. Ukuran keberhasilan implementasi yang lain dinyatakan dengan aktivitas-aktivitas yang secara umum menunjukkan arah produktif walaupun arah tersebut tidak ditentukan sebelumnya. Ukuran lain yang longgar, yang juga sering kali digunakan adalah waktu yang digunakan untuk menghasilkan kemajuan. Asumsi yang dipakai bahwa semakin pendek waktu yang dilewatkan/dibutuhkan kemajuan itu semakin tinggi tingkat keberhasilan. Sebagaimana diindikasikan di atas kelancaran fungsi operasi dan tidak adanya keluhan atau konflik tentang prosedur-prosedur dianggap sebagai keberhasilan implementasi."

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan adalah tercapainya tujuan yang diharapkan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ripley & Franklin (dalam Winarno, 2012:14) bahwa ukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari:

1. keberhasilan suatu implementasi dapat diukur dengan tingkat kepatuhan birokrasi di tingkat bawah terhadap birokrasi di atasnya.

2. bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.
3. bahwa keberhasilan implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampaknya yang dikehendaki dari sasaran-sasaran program yang ada.

Ukuran ini telah menjadi ukuran yang sangat umum dan dipakai oleh setiap pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijakan. Ukuran-ukuran yang lain dapat disebutkan adalah waktu dalam pencapaian tujuan. Implementasi kebijakan biasanya dipengaruhi oleh beberapa variabel atau faktor-faktor yang menentukan agar tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2009:139), menyatakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumberdaya Implementasi.

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumber daya

material (*matrial resources*), dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

3. Komunikasi antar Organisasi.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

4. Karakteristik agen pelaksana.

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5. Disposisi Implementor.

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu :

- (a) Respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.
- (b) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan
- (c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Sedangkan menurut Menurut Edward III (dalam Agustino, 2020: 154) ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan

secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga yaitu (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material, dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan

permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

4. Struktur Birokrasi

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hierarkis yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal yaitu: (a) jenjang hirerarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat "siapa yang bertanggung jawab kepada siapa"; (b) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan "siapa yang melakukan apa"; (c) berbagai

saluran komunikasi yang terdapat didalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan "siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa"; (d) jaringan komunikasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (e) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting, salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP. Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak. Fleksibel.

Grindle (dalam Nawawi, 2009: 143-144), mengungkapkan indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik, adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

2. Tipe manfaat

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang diwujudkan dalam pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5. Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

6. Sumber-sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Menurut Charles O' Jones (dalam Nawawi 2009:132) proses implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut:

1. Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan
2. Interpretasi: Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Aplikasi/Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dapat juga dikatakan bahwa efektivitas suatu proses implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku birokrasi pelaksanaannya, dan perilaku tersebut akan dipengaruhi pula oleh lingkungan kebijakan. Aktor kebijakan berperan sangat penting didalam menentukan implementasi kebijakan. Mereka tidak terlepas dari nilai-nilai yang muncul diluar dirinya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan/Terdahulu

Kontribusi yang akan menjadi perbandingan (komperatif) dalam penelitian ini, maka dapat ditelaah terhadap penelitian terdahulu, antara lain:

1. Annisa Maghfirah (2021), Judul: Implementasi Perwali Nomor 58 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari karakteristik masalah, implementasi kebijakan tersebut lebih sulit dalam pelaksanaannya. Secara kuantitas kebijakan tersebut cukup efektif namun secara kualitas membutuhkan jangka waktu yang lama. Jika dilihat dari karakteristik kebijakannya, kebijakan tersebut sudah memiliki aturan yang jelas untuk dilaksanakan. Sedangkan jika dilihat dari lingkungan kebijakan, masyarakat sudah mulai terbuka dan menerima kebijakan tersebut, terlihat dengan adanya partisipasi masyarakat. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu adanya sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan faktor penghambat yaitu keberadaan gepeng yang tidak dapat diprediksi, sarana dan prasarana penunjang untuk penegakan sanksi hukum belum dapat terpenuhi, dan mindset gepeng itu sendiri yang sulit untuk diubah. Hasil penelitian tersebut dalam kaitan dengan

penelitian ini, terdapat perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu dilakukan di Kota Banjarmasin sementara penelitian ini berlokasi di Kota Pontianak. Disamping itu teori yang digunakan sebagai pisaunya analisis, dimana penelitian terdahulu menggunakan teori Edward III, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori Charles O'Jones. Kemudian persamaannya adalah sama-sama mengungkapkan masalah implementasi kebijakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* serta sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

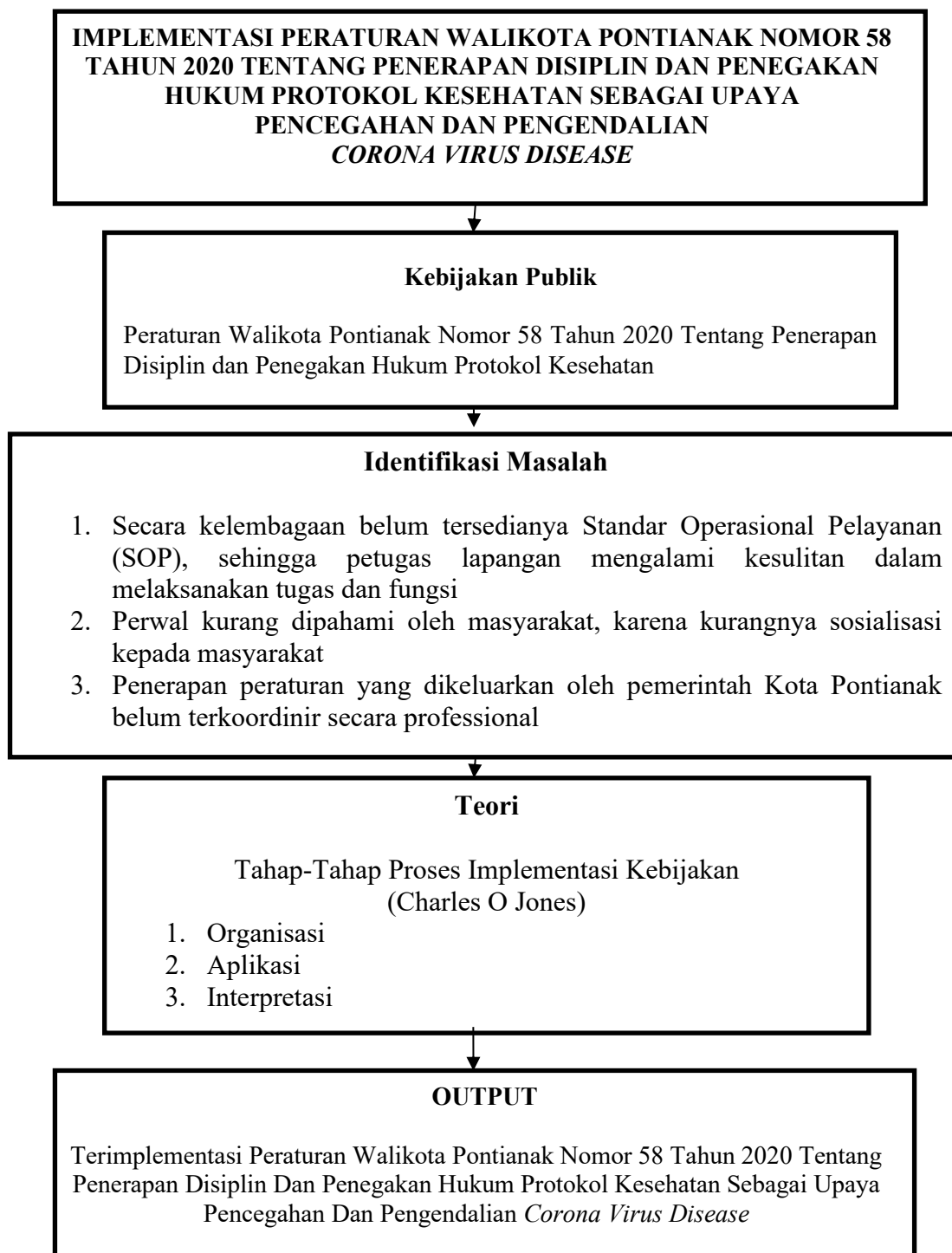
2. Subhan Muhith (2012), Judul: Implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 19* di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 19* di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 19* di Kota Palembang belum berjalan dengan baik, karena terdapat beberapa permasalahan yaitu masih lemahnya pengawasan Satpol PP dan Dinas Sosial terhadap penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 19* di Kota Palembang, kurangnya dana dalam penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 19* dan masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 19 di Kota Palembang. Hasil penelitian tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini, terdapat perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu dilakukan di Kota Palembang sementara penelitian ini berlokasi di Kota Pontianak. Disamping itu teori yang digunakan sebagai pisau analisis, dimana penelitian terdahulu menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori Charles O'Jones. Kemudian persamaannya adalah sama-sama mengungkapkan masalah implementasi penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 19 serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

1.3 Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu secara kelembagaan belum tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP), sehingga petugas lapangan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Perwal kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak belum terkoordinir secara professional. Selanjutnya peneliti akan mengkaji proses implementasi Perda tersebut dengan menggunakan teori Charles O'Jones yang mengkaji tiga dimensi

yaitu dimensi organisasi, aplikasi dan interpretasi. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui bagaimana sesungguhnya Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dalam mengatasi masalah Pengemis dijalankan. Bertitik tolak dari pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1**Alur Pikir Penelitian**

1.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, maka peneliti mengajukan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengorganisasian dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* di area *coffee street* Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tanggara Kota Pontianak?
2. Bagaimana interpretasi dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* di area *coffee street* Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tanggara Kota Pontianak?
3. Bagaimana aplikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* di area *coffee street* Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tanggara Kota Pontianak?